



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau mengimplementasikan pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu menyinkronkan tujuan dan sasaran dalam RPD 2025-2026. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Sasaran 1.3 :

Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inklusif.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya proses dan tahapan pembangunan daerah. Olehnya itu setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, tepat dan selaras sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan perencanaan yang lebih terarah dan terukur.



Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu 2025 - 2026

Hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dengan Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Strategis (Renstra) serta Cascading Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dapat dilihat dalam tabel berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DKISP Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

Tujuan PEMDA	Sasaran PEMDA	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Baseline (2023)	Target	
						2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih				Indeks Reformasi Birokrasi	54,71	55,81	55,97
	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah			SAKIP	60,88	63,21	63,87
				IPKD	51,4366	60,2321	61,4621
	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang inklusif			Indeks Pelayanan Publik	78,14	78,56	78,92



		Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang menopang Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai PPID	65,50 Cukup Informatif	82,80 Menuju Informatif	91,25 Informatif
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	74,65 (BB)	76,65 (BB)	78,80 (BB)
			Meningkatkan Penyebaran Informasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	75 %	80 %	85 %
			Implementasi E-Government pada	Indeks SPBE	2,58	2,65	3,00



			Layanan Pemerintah Daerah				
			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	90 %	95 %	95 %
			Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	1,27	2,60	2,89



Tabel 4.2
Cascading Kinerja

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2023)	Target	
							2025	2026
Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang Menopang Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan					Indeks Reformasi Birokrasi	54,71	55,81	55,97
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Predikat Penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	74,65 (BB)	75,50 (BB)	78,80 (BB)



		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten						
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen



					Dokumen RKA-SKPD			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Org/Bulan	39 Org/Bulan	39 Org/Bulan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis



					Umum Perangkat Daerah			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	42 Laporan	24 Laporan	42 Laporan



				dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan



			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara atau dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit



	Meningkatkan Penyebaran Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	91,67 %	93 %	95 %
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	35 %	40%	50 %
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen



				Komunikasi Publik	Media Komunikasi Publik yang dikelola			
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
				Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	40 Layanan	40 Layanan	40 Layanan
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	1 Orang
	Implementasi E-Government pada Layanan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	100 %	100 %



			Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	90,9 %	91,5 %	93%
				Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data Pemerintahan	35 Unit	35 Unit	35 Unit



				Pemerintahan Daerah	Daerah yang dikelola			
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit	2 Unit
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun	100 %	100 %	100 %



					Perencanaan Pembangunan			
			Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	45 %	55 %	65 %
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Persandian Pemerintah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			Tingkat Kematangan Informasi Pemerintah	Level I	Level I	Level I



			Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %
				Penyediaan Layanan Keamanan	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan	35 OPD	35 OPD	35 OPD



				Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Keamanan Informasi			
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Kematangan Informasi Pemerintah	Level I	Level I	Level I
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaring Komunikasi Sandi	35 OPD	35 OPD	35 OPD